

MEDIA KALTIMTARA

KAMIS,
21 SEPTEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



KASUS TBC DI TARAKAN CAPAI 452 ORANG

BACA HALAMAN 2



PENENTUAN TITIK PEMASANGAN
ALGAKA, PANWASCAM MINTA
PERLU ADANYA KOORDINASI

BACA HALAMAN 9

Kasus TBC di Tarakan Capai 452 orang

Dinkes Ingatkan Penderita Jangan Malas Berobat

TARAKAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan, selama Januari hingga September 2023 menemukan 452 kasus Tuberkulosis (TBC). Hal itu ditemukan Dinkes setelah memeriksa 4.568 orang.

“Yang sudah diperiksa sebanyak 4.568. ini untuk target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah sasaran TB 1.252 orang, capaian penemuan kasus TB 452,” ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tarakan, Irwan Yuwanda kepada mediakaltimtaras, Rabu (20/9/2023).

Irwan mengatakan, pengobatan TBC memerlukan waktu yang lama sekitar 6 bulan. Pengobatan yang cukup lama tersebut diperlukan untuk membunuh secara total semua bakteri penyebab TBC dalam tubuh seseorang. Pengobatan TBC, lanjut Irwan, tersedia di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Tarakan bahkan, obatnya pun gratis.

“Semua puskesmas ada, Rumah Sakit Umum ada, Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) ada, RS Carasa, dan semua RS di Tarakan ada. Jadi semuanya sudah terjangkau dan yang terpenting kesiapan penderita karena takut kaget minum obat banyak,” katanya.

Dia tak menampik bahwa masih banyak pasien yang tidak rutin berobat karena merasa sudah sembuh. Padahal untuk sembuh total dari TBC tidak boleh putus berobat selama 6 bulan. “Melakukan edukasi kepada penderita. Dengan mengedukasi penderita bahwa harus melalui pengobatan selama 6 bulan bahkan lebih dan ini tidak boleh putus dan harus rutin. Jangan langsung berhenti ketika merasa sembuh. Pastinya kami harus iedukasi dulu karena pemahaman berbeda-beda,” tuturnya.

Untuk itu, Irwan mengingatkan kepada penderita TBC untuk mengikuti



ADE/TRK

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tarakan, Irwan Yuwanda.

tata cara pelaksana pengobatan sampai dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Selain itu, mematuhi pola hidup penderita TBC, ketika batuk tidak boleh membuang sembarangan dan rutin menggunakan masker. “Karena fase awal 1 atau 2 bulan itu, fase penularan. Tapi insyaallah kalau 4,5, dan 6 bulan, bakterinya sudah tidak aktif menularkan. Tapi bagaimanapun tetap jaga pola hidup. Artinya kesadaran diri ditingkatkan,” jelasnya.

Guna mengurangi penyebaran kasus TBC, Dinas Kesehatan Kota Tarakan gencar melakukan investigasi kontak. Dijelaskan Irwan, Investigasi Kontak (IK) merupakan kegiatan

yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan sumber infeksi TBC.

“Jadi ketika ada pasien TBC kader kesehatan dan petugas kesehatan akan investigasi kontak. Sama kek covid ada pasien satu langsung dicari TBC juga begitu. Minimal 15 orang jadi kontakannya dengan siapa siapa aja sih. Kalau serumah wajib itu ada terapi pencegahan Tuberkulosis. Kemudian yg kontak itu diperiksa dan di edukasi,” tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika

Begini Strategi KPU Tarakan Tekan Angka Golput

TARAKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan melakukan upaya yang maksimal dalam memfasilitasi pemilih untuk menekan angka golput di pemilu 2024. Salah satunya, dengan memfasilitasi pelayanan terhadap pemilih yang pindah memilih sesuai dengan ketentuan dan peraturan teknis yang ada.

KPU Tarakan memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024, bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP)-nya.

“Tarakan ini kota yang dinamis. Maksudnya pergerakan manusianya tinggi. Kita sedang melakukan proses Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Sementara ini kita sedang melakukan sosialisasi di berbagai tempat masuk ke masyarakat dan ke depannya ke kampus dan instansi vertikal,” ucap Anggota KPU Kota Tarakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Herry Fitrian, Rabu (20/9/2023).

Di Tarakan, kata Herry, ada banyak mahasiswa dan pekerja yang memiliki KTP luar daerah Tarakan sehingga perlu mengurus surat pindah memilih.

“Diperkirakan hampir 20 ribu mahasiswa di Tarakan. Rerata KTP mereka dari luar Tarakan. Itu sebaiknya mahasiswa ataupun pekerja yang memiliki KTP luar. Misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN, instansi vertikal seperti Bank Indonesia, BPK, Pajak, PLN atau Telkom. Itu nanti bisa ajukan surat pindah memilih dapat diajukan dengan mendatangi kantor kelurahan, kecamatan atau kantor KPU,” jelasnya.

Herry mengatakan, dalam waktu dekat KPU akan melakukan jemput bola untuk masuk ke perusahaan maupun instansi-intansi vertikal. Dia mengingatkan masyarakat untuk mengurus surat pindah memilih dengan menyertakan dokumen yang diperlukan.

“Jangan sampai mereka yang punya hak pilih namun bukan warga Tarakan tidak bisa memilih. Nanti ketika dekat hari pemilu baru mau urus. Tiba tiba datang ke kantor KPU tapi kita sudah menutup akses untuk pindah memilih. Karena h-7 kita sudah men-



ISTIMEWA

Anggota KPU Kota Tarakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Herry Fitrian.

etapkan surat suara,” bebernya.

Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat untuk menekan angka golput di Tarakan. Mulai dari pemilih pemula, pemilih perempuan, serta disabilitas. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberi edukasi tentang tahapan pemilu. Sehingga harapannya proses penyampaian informasi kepada pemilih dapat meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu.

“Ada juga basis disabilitas, bagaimana hak-hak pemenuhan disabilitas saat memilih terpenuhi. Bagaimana TPS-nya ketika mengetahui ada pemilih disabilitas, dia itu bisa aman dan nyaman memilih TPS. Maka ditetapkan lah TPS yang tidak jauh dari rumahnya. Itu harus kita pikirkan,” ucapnya.



Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan kepada pemilih marginal yang salah satunya menysasar pada kelompok nelayan.

“Misalnya di Tarakan ada air jadi air hidup itukan pengaruh. Bagaimana kita yakinkan masyarakat bahwa nelayan tetap bisa memilih. Kita harus usahakan sebelum mereka melaut mereka memilih juga,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Herry pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dan jangan golput di pemilu 2024. Sebab, hak suara tersebut akan menentukan pemimpin di masa depan.

“Setiap sendi kehidupan di masyarakat mendapatkan fasilitas itu berdasarkan hasil keputusan politik dari pemimpin kita. Dari presiden maupun dewan. Masyarakat ke rumah sakit gratis itu keputusan politik. Kemudian sekolah gratis itukan keputusan politik. Lalu sekolah mendapat beasiswa itu keputusan politik. Atau masyarakat dapat bantuan, misalnya keluarga miskin dapat bantuan dari kementerian itu kan keputusan politik. Jadi sebenarnya sayang sekali terutama generasi muda tidak memilih, lalu apatis padahal ini sangat bermanfaat buat

masa yang akan datang,” tutupnya.

Untuk diketahui, melansir dari laman KPU RI bahwa ada 9 alasan pemilih dapat pindah memilih yang selambat-lambatnya diurus pada H-30 atau 15 Januari 2024, di antaranya :

- 1.) Bertugas di tempat lain, dengan bukti dukung surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
- 2.) Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap, dengan bukti surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping.
- 3.) Tertimpa bencana, dengan surat dari BNPPB, kepala desa/lurah, atau pemberitaan dari media massa.
- 4.) Menjadi tahanan rutan/lapas atau menjadi terpidana, dilengkapi surat pernyataan dari kalapas atau karutan.
- 5.) Penyandang disabilitas dirawat di panti sosial/rehabilitasi, disertai surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
- 6.) Menjalani rehabilitasi narkoba, dengan surat keterangan dari

pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah

- 7.) Bekerja di luar domisili, dengan surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
- 8.) Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, dengan surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
- 9.) Pindah domisili, dengan bukti fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru.

Sementara itu, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, ada empat kondisi pemilih dapat mengurus pindah memilih selambatnya H-7 atau 7 Februari 2024. Kondisi tersebut yakni bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap (sakit), tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan/lapas. Semua alasan pindah memilih disertai dokumen bukti dukungannya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Kapal Indomaya Rute Tarakan-Tawau Dibuka Kembali, Segini Harga Tiketnya

TARAKAN – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Regional IV Cabang Tarakan akhirnya memberikan kepastian kapan Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau akan beroperasi kembali.

Kepastian itu diberikan usai Pelindo melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, KSOP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Balai Karantina Pertanian dan Pemkot Tarakan, Selasa (19/9/2023) siang. Dari hasil rapat, diketahui Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau dibuka untuk umum mulai Kamis (28/9/2023).

“Jumat kapal beroperasi tapi masih belum reguler. Ini untuk kegiatan tamu pekan olahraga dari Tawau menuju ke Tarakan itu hari Jumat ini. Yang regulernya nanti InsyaAllah (28/9/2023) kita buka dan mudahan animo masyarakat cukup besar tidak hanya di Tarakan, kami minta bantuan semua pihak termasuk media bisa dipublish informasi ini bahwa 28 insyaAllah perdana reguler dari Tarakan rute Tawau,” ucap GM PT Pelindo Persero Regional IV Cabang Tarakan Rio Dwi Santoso, Rabu (20/9/2023).

Rio Dwi Santoso mengatakan tiket rute Tarakan-Tawau bisa dibeli secara online melalui easybook.com. Selain melalui online, tiket juga dapat dibeli secara langsung dengan mendatangi terminal Pelabuhan Malundung Tarakan. Untuk harga sendiri, kata Rio, yakni Rp 850 ribu.

“Untuk harga sendiri, kembali ke rute awal melalui sisi luar dan bukan melalui sungai seperti yang disampaikan pihaknya dalam wawancara sebelumnya. Jadi lewat sisi luar dari Sebatik itu informasi dari agen kurang lebihnya Rp850 ribu dan tiket bisa dibeli secara online melalui easybook.com dan bisa juga melalui kantornya Kapal Indomaya ataupun secara langsung datang ke terminal Pelabuhan Malundung Tarakan tapi pas mau keberangkatan,” katanya.

Sementara untuk jadwal, dalam seminggu ada tiga kali keberangkatan untuk reguler dari Tarakan-Tawau. Adapun waktu keberangkatan tersebut Senin, Rabu dan Jumat berangkat pukul 10.00 Wita dan Tawau-Tarakan berangkat pada Kamis dan Sabtu pukul 10.00 Wita. “Sementara masih

satu operator yang konfirmasi dari Kapal Indomaya untuk 28 September mendatang,” lanjutnya

Meskipun dibuka pada (28/9/2023) mendatang, lanjut Rio, perjalanan perdana Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau dimulai Jumat ini. Namun bukan kategori reguler dan hanya khusus mengangkut penumpang dengan sistem carter dari Tawau masuk ke Tarakan. Pengangkutan penumpang dari Tawau dalam rangka menyemarakkan even Pekan Olahraga. Sebab Tarakan menjadi tuan rumah untuk even Hash yang akan dilaksanakan di September ini dan mengundang berbagai peserta dari luar negara Indonesia termasuk peserta dari Malaysia.

Sebagai informasi, Kapal Indomaya dari Pelabuhan Malundung Tarakan menuju Tawau hanya membutuhkan waktu estimasi kurang lebih tiga jam. Dahulunya Kapal Indomaya rute Tarakan-Tawau sempat beroperasi namun terhenti karena terjadi pandemi Covid-19. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Easybook App 

Kapal Indomaya

TARAKAN - TAWAU
SENIN RABU JUMAT
BERANGKAT PUKUL 10.00 WITA

TAWAU - TARAKAN
SELASA KAMIS SABTU
BERANGKAT PUKUL 10.00 WITA

PESAN SEKARANG

easybook.COM
— Complete Your Journey —



Beberapa unit Buncu Baca Etam.

6 Unit Buncu Baca Etam Disalurkan ke Kubar dan Mahulu

SAMARINDA - Sebagai upaya mempercepat peningkatan literasi di kawasan hulu Sungai Mahakam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim kembali menyalurkan anjungan baca.

Diketahui, Buncu Baca Etam akan disalurkan ke dua daerah, yakni Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Isran Noor pada 13 September lalu.

Pustakawan Ahli Muda DPK Kaltim, Patimah Irni menerangkan, dua kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Kalimantan Timur itu masing-masing mendapat tiga unit Buncu Baca Etam. "Untuk di Kubar, itu ada

di Perpustakaan, Kantor Bupati dan Dermaga Melak-Samarinda. Sedangkan, Mahulu diserahkan ke bagian Kesra," jelasnya, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, karena kondisi sangat jauh dari perkotaan, masyarakat di daerah hulu sungai Mahakam mengaku sangat terbantu dengan Buncu Baca Etam. "Masyarakat malah minta diperbanyak yang minta setiap kecamatan, karena sangat membantu bagi mereka yang ingin buku bacaan," ujar Irni.

Sementara itu, Kepala Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama DPK Kaltim, Mustika Wati mengatakan, penyerahan ini untuk kesekian kalinya dilakukan demi memenuhi kebutuhan bahan bacaan untuk

mencerdaskan masyarakat yang tinggal di hulu sungai Mahakam.

"Iya kami berharap, Buncu baca Etam bisa menjadi pilihan alternatif sebagai bahan bacaan," imbuhnya.

Adapun koleksi buku digital yang dimiliki Buncu Baca Etam yang bisa didownload sebanyak 600 koleksi buku yang terdiri dari berbagai macam judul buku.

Pengguna Buncu Baca Etam dapat menggunakan fasilitas ini secara gratis, melalui cara scan QR Code yang tersedia pada mesin Buncu Baca Etam.

Pengguna juga dapat bebas memilih buku seperti buku cerita anak, pengetahuan umum, kesehatan dan koleksi buku lainnya. (adv/and)



Ilustrasi penerimaan PPPK di bidang kesehatan, pendidikan dan teknis.

Pemkab Bulungan Buka 332 Formasi untuk PPPK

TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan pada tahun 2023 ini akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Bulungan, Syarwani menyebut, pihaknya hingga saat ini belum menerima edaran yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait dengan pembatalan penghapusan tenaga honor.

"Soal pembatalan penghapusan tenaga honorer, kami belum ada menerima surat edarannya," bebernya, Rabu (20/9/2023).

Dirinya mengaku telah melayangkan Surat Keputusan (SK) untuk pelaksanaan penerimaan PPPK di lingkup Pemkab Bulungan. Mengenai kuota, papar Syarwani, ada 332 formasi.

"Formasi yang disetujui yaitu untuk bidang kesehatan, guru dan

teknis. Kuota yang kita terima, tentu masih terbatas, dengan kebutuhan," ujarnya.

Menurut orang nomor satu di kabupaten dengan sebutan Kota Ibadah itu, dengan adanya penerimaan PPPK, Pemkab Bulungan harus memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, berpengaruh pada sisi pembiayaan.

"Keberadaan PPPK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di setiap perangkat daerah. Mengingat, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bulungan masih kurang karena ditinggal purna tugas," jelasnya.

Mengenai teknis penerimaan PPPK, diprioritaskan untuk non aparatur sipil negara (ASN) atau honorer. Jika mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan pelaksanaan rekrutmen PPPK akan dilakukan pada tahun ini.

Dimungkinkan, hal itu pada Oktober 2023 sudah mulai berjalan. Sementara, untuk seleksi calon apar-

tur sipil negara (CASN) dipastikan tidak ada. Sebab, Pemkab Bulungan masih fokus untuk rekrutmen PPPK.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Nurdiana menerangkan, jadwal untuk pengumuman seleksi PPPK itu yakni 19 September - 3 Oktober 2023.

"Kemudian, pendaftaran dimulai 20 September hingga 9 Oktober. Bahwa dari sisi jadwal itu mengalami perubahan," tuturnya.

Sementara, soal seleksi administrasi dimulai 20 September hingga 12 Oktober 2023. "Untuk tahun ini dipastikan tidak ada seleksi CASN, dan memang sejak awal tidak diusulkan, kita hanya mengusulkan untuk PPPK," tutupnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Keluarga almarhum, Daud (45) saat bersiap untuk mengantarkan jenazah ke Pelabuhan.

Mayat yang Ditemukan Tanpa Identitas Telah Dipulangkan ke Kampung Halaman, Polisi Tengah Lakukan Penyelidikan

TANJUNG SELOR - Seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di kebun masyarakat perbatasan Mess PT Abdi Borneo, Divisi Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor telah diketahui identitasnya.

Diketahui, pria itu bernama Daud (45), warga asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan karyawan PT Abdi Borneo. Dirinya telah bekerja di perusahaan tersebut selama 7 bulan, dengan status sebagai pihak ketiga. Tugasnya adalah menyuplai tenaga kerja ke pihak perusahaan.

Ketua KKB NTT Bulungan, Serfus Yanto menerangkan, mengenai kronologis kejadian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian untuk diselidiki.

"Belajar dari kasus ini, saya minta kepada warga NTT dimanapun berada, ketika ada rekan kerjanya yang hilang kontak, lebih dari dua atau tiga hari, dan tanpa diketahui keberadaannya harus segera melaporkan, supaya cepat dicari tahu. Melihat

kondisi mayat ini, kita sangat perihatin, kemungkinan sudah meninggal dua minggu, baru ditemukan," ucapnya, Rabu (20/9/2023).

Dia menyebut, yang bersangkutan meninggalkan seorang istri dan dua anaknya. "Anak dan istrinya ada di kampung, begitu mendengar kabar duka ini, mereka berharap jenazah almarhum bisa dipulangkan dan dimakamkan ke kampung halaman," tuturnya.

Kedepannya, kata Serfus Yanto, pihaknya bakal mendata seluruh warga NTT di Kabupaten Bulungan, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan, supaya pengurus memiliki database soal keberadaan dan jumlah warga NTT di Bulungan.

Secara terpisah, manager PT Abdi Borneo, Bosik Sinaga saat dikonfirmasi menyarankan untuk berkoordinasi dengan bagian Humas perusahaan. Mengenai keseharian almarhum yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. "Maaf pak, silahkan ke bagian Humas," katanya

melalui pesan singkat WhatsApp.

Sementara, Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Agus Nugraha, melalui kasi humas Bripta Hadi Purnomo membenarkan soal adanya beberapa orang saksi yang diperiksa oleh kepolisian. "Untuk dugaan sementara, belum diketahui sampai hari ini. Kepolisian tengah menyelidiki, dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi," jelasnya.

Adapun mengenai perkembangan, akan disampaikan dikemudian hari. "Nanti perkembangan hasil penyelidikan kita informasikan," imbuhnya.

Sebagai informasi, jenazah korban secara resmi dipulangkan ke kampung halaman. Perusahaan juga telah memfasilitasi keberangkatan hingga tiba di Kupang, NTT. Selanjutnya dari Kupang ke Sumba Barat diminta kerjasama pihak keluarga dalam urusan akomodasi. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Koordinasi Panwascam dan PPK saat berdialog dan berdiskusi santai di Jalan Gapensi Tanjung Selor.

Penentuan Titik Pemasangan Algaka, Panwascam Minta Perlu Adanya Koordinasi

TANJUNG SELOR - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tanjung Selor, gelar koordinasi mengenai rencana pemasangan alat peraga kampanye (Algaka) pada pemilu tahun 2024.

Ketua Panwascam Tanjung Selor, Hary Fitriani Noor menyampaikan, koordinasi itu sebagai bentuk pencegahan terhadap indikasi dan potensi sengketa terhadap pemasangan algaka.

Dikatakan, Beberapa wilayah yang telah direncanakan penentuan titik pemasangan algaka, seperti di Desa Jelarai, Gunung Seriang dan Bumi Rahayu.

"Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan panwascam, tapi kalau ada persoalan di lapangan jadinya PPK kerja dua kali. Nah, itu yang tidak kita inginkan, sehingga perlu adanya koordinasi sejak awal," ujar Hary,

saat ditemui Rabu (20/9/2023).

Selain itu, Hary juga meminta perlu adanya koordinasi yang intens sesama penyelenggara pemilu di tingkat Desa dan Kelurahan, antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD). "Sehingga tidak terjadi renggang koordinasi dalam menjalankan tugas ke pemilu-an," tuturnya.

Soal lokasi algaka yang spasenya terbatas, Hary menyarankan untuk mencarikan tempat yang ideal dan representatif. "Cari ruang yang efektif, dengan tetap memperhatikan estetika, etika, kebersihan dan keindahan kota," tukasnya.

Dia menyarankan, jangan sampai persoalan spesifikasi lahan yang terbatas menimbulkan potensi sengketa. Dia mencontohkan, salah satunya di perempatan Jalan Poros Jelarai, dari sisi lokasinya tergolong sempit. Dan Soal lokasi ini, perlu adanya

koordinasi dari tingkat bawah. "Hal ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya proses sengketa pemilu," katanya.

Sementara itu, ketua PPK Tanjung Selor, Ardi Ramadhan Noor menuturkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Panwascam akan ditindaklanjuti. "Soal itu nanti kita inventarisir kembali, tapi ini konsepnya masih tahap perencanaan dan usulan," jelasnya.

Biasanya, lanjut Ardi dalam rencana titik pemasangan algaka PPS melibatkan pihak kelurahan dan Desa. "Nanti kita akan inventarisir kembali, semoga kedepan tidak ada lagi persoalan mengenai rencana titik pemasangan algaka," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Sosialisasi soal peningkatan mutu dan kualitas perpustakaan sekolah di Kaltara.

Perpustakaan Sekolah di Kaltara Banyak yang Belum Terakreditasi

TANJUNG SELOR - Sebanyak 842 Sekolah di Kalimantan Utara (Kaltara), hanya 165 diantaranya yang telah mengantongi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Realisasi itu, bahkan belum mencapai angka 50 persen. Sementara, perpustakaan yang telah mendapatkan akreditasi angkanya masih tergolong rendah, yaitu 23 perpustakaan. Angka tersebut, bersumber dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik).

Kepada wartawan, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (Perpusnas), Nurcahyono membeberkan selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, Perpusnas telah menerbitkan aturan pada bidang perpustakaan.

"Regulasi yang dikeluarkan, berkaitan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria perpustakaan sekolah," tuturnya.

Regulasi dimaksudkan, bertujuan untuk penyatuan persepsi dalam menangani perpustakaan, utamanya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Dia memaparkan, hasil sensus perpustakaan sekala Nasional, beberapa tahun lalu jumlah perpustakaan seko-

lah dan madrasah sebanyak 113.541 dan yang sudah terakreditasi per 31 Januari 2023 baru sebanyak 7.908 atau 6,96 persen.

"Data tersebut disimpulkan, masih banyak sekolah yang perpustakaan-nya belum terakreditasi. Kita dorong ini untuk dikembangkan," katanya.

Selanjutnya, Perpusnas dan Perpustakaan Daerah di tingkat Provinsi, harus menyosialisasikan NSPK kepada semua pihak, utamanya mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan perpustakaan.

"Sosialisasi ini diperlukan, untuk memastikan agar perpustakaan sekolah atau madrasah diselenggarakan sesuai dengan enam Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," sebutnya.

Adapun enam SNP dimaksud, antara lain koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Sekolah yang belum sesuai SNP bakal mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Perpusnas. "Tidak terkecuali bagi perpustakaan sekolah yang ada di wilayah Kaltara," terangnya.

Terhadap perpustakaan yang sudah sesuai dengan SNP akan direkomendasikan untuk diakreditasi oleh Direktorat Standardisasi dan Akredi-

tasi. Melalui bimtek, dia berharap perpustakaan dapat memperoleh pengetahuan manajerial dan keahlian teknis dasar dalam mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan.

DPK Kaltara, diharapkan dapat meniru dan meneruskan kegiatan yang sama, dengan membuat program pembinaan melalui dana APBD. Sehingga kualitas perpustakaan yang ada dapat ditingkatkan dari segi mutu dan kualitas.

Senada, diungkapkan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltara, Yosua Batara Payangan bahwa kondisi di Kaltara masih banyak perpustakaan sekolah yang belum terakreditasi.

"Beragam upaya kita lakukan untuk peningkatan akreditasi, melalui bimbingan dan sosialisasi," tukasnya.

Bimtek terus dioptimalkan, dengan melibatkan DPK antar Kabupaten dan Kota di Kaltara. "Itu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan animo masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengembangan literasi," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



Lebih Dekat dengan Satu Klik



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

RATUSAN DRIVER OJEK DEMO

AJUKAN TIGA TUNTUTAN
KE PEMPROV KALTIM

BACA HALAMAN 2-3



DINKES KALTIM
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PUSKESMAS BAIKNYA
SIAPKAN RUANGAN KHUSUS
LAYANAN LANJUT USIA

HASANUDDIN MAS'UD
OPTIMIS PJ GUBERNUR
SALAH SATU DARI
USULAN DPRD KALTIM
BACA HALAMAN 29





ISTIMEWA

Lakukan aksi damai, driver ojek merasa rugi dengan kebijakan berlaku.

Ratusan Driver Ojek Demo

Ajukan Tiga Tuntutan ke Pemprov Kaltim

SAMARINDA- Ratusan driver ojek online (ojol) dan taksi online, yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMBK) melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Ratusan peserta aksi yang tersebar di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, serta Kabupaten Berau.

Kordinator aksi damai Ivan Jaya mengatakan, sejak adanya kebijakan pemerintah naiknya harga BBM pada tahun 2022 lalu. Membuat para driver ojol dan taksi online merasa rugi.

"Kami meminta pemerintah provinsi Kaltim menetapkan surat keputusan Gubernur Kaltim, terkait tarif dasar untuk layanan jasa pengan-

taran penumpang bagi driver taksi online (roda empat). Hingga saat ini belum ada kenaikan tarif untuk layanan itu," ungkap Ivan Jaya, di tengah aksi damai, Rabu (20/9/2023).

Lanjut Ivan, driver ojol juga mengeluhkan lantaran pihak perusahaan aplikasi melakukan persaingan tarif tidak sehat dan memangkas tarif dasar driver agar terlihat lebih murah, serta membuat program promosi yang sangat merugikan mitra driver di Kaltim.

Kemudian, meminta Pemprov Kaltim menetapkan peraturan terkait tarif dasar untuk layanan jasa pengantaran makanan dan barang bagi Ojol (roda 2), pasalnya belum memiliki aturan baik ditingkat nasional maupun daerah yang mengatur jasa layanan tersebut.

"Karena itu pihak perusahaan aplikasi secara bebas saling melakukan persaingan tidak sehat berupa program yang memangkas tarif dasar dan pendapatan driver ojek," ujarnya.

Para driver ojek juga meminta Pemprov Kaltim, untuk segera memberikan sanksi dan menindak tegas perusahaan aplikasi yang beroperasi di daerah Kaltim yang tidak mengikuti peraturan.

"Perusahaan aplikasi yang sangat merugikan pada driver ojek harus segera mendapatkan sanksi tegas dari Pemprov Kaltim. Semoga aksi damai hari ini bisa disikapi oleh Gubernur Kaltim," pungkas Ivan.

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Kadishub Kaltim akan buat surat rekomendasi untuk aplikator di Samarinda.

Promosi Merugikan Ojol, Dishub Kaltim akan Berikan Sanksi ke Aplikator di Samarinda

SAMARINDA- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yudha Pranoto menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan driver ojek online (ojol) di hadapan Kantor Gubernur Kaltim.

Yudha mengatakan, tanda tangan Gubernur Kaltim Isran Noor yang diharapkan oleh para driver untuk mengubah peraturan, dianggap keliru.

"Mereka berharap tanda tangan Gubernur Kaltim ini bisa untuk mengubah nasib. Padahal kan' untuk R2 sudah menjadi wewenang kementerian pusat, kita tidak bisa memaksa," kata Kadis Dishub Kaltim Yudha Pranoto, pada Rabu (20/9/2023).

Saat melakukan aksi damai, para driver ojek sempat ricuh dengan sesama driver, untung kejadian tersebut

tidak berlangsung lama. Dan Gubernur Kaltim Isran Noor tak tampak terlihat menemui driver.

Kata Yudha, seluruh driver ojek di Indonesia memiliki kondisi yang serupa. Tetapi, untuk tarif tidak bisa disamakan dengan daerah di luar Kota Samarinda.

"Memang tidak bisa disamakan tarif di Samarinda dengan di luar kota, misalnya Jawa di sana dari harga sembako saja sudah jauh beda. Kita juga sebenarnya turut prihatin dengan kondisi driver yang digencet oleh promosi-promosi yang dibuat oleh perusahaan aplikasi," imbuhnya.

Diketahui, Gubernur Kaltim telah bersurat kepada menteri untuk memberikan penyesuaian tarif.

"Surat rekomendasi yang dikirim ke kementerian berisi untuk pem-

berlakuan tarif pengantaran barang atau makanan, kedua penghapusan promo-promo," kata Yudha.

Driver ojek juga meminta agar perusahaan aplikasi mendapatkan sanksi tegas, dan menghapuskan promosi-promosi yang merugikan driver ojek.

"Kalau memberikan sanksi kita bisa, tapi hanya sebatas kemampuan kita karena aplikator pusatnya di Jakarta. Dan 2x24 jam memberikan teguran untuk memberhentikan promo itu, nanti kita buat suratnya untuk aplikator. Ini sudah menjadi regulasi Dinas Perhubungan Kaltim. Serta kami akan bertemu dengan Wakil Gubernur Kaltim," tutupnya.

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Dorong Perpustakaan Sesuai SNP, Perpunas Gelar Bimtek Perpustakaan Sekolah/Madrasah

TARAKAN - Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpunas Nurcahyono mengatakan selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan. Perpunas telah menerbitkan berbagai regulasi/aturan di bidang perpustakaan, salah satunya adalah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perpustakaan sekolah/madrasah. Agar tercipta kesamaan persepsi guna menghindari kesalahpahaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

"Kita (Perpunas dan Perpustakaan Daerah Provinsi) harus menyosialisasikan NSPK ini kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah, khususnya para pimpinan sekolah/madrasah," ujar Nurcahyono dalam pembukaan bimbingan teknis (bimtek) Perpustakaan sekolah/madrasah Tahun 2023 di Swissbel Hotel, Selasa (19/9).

Hal ini, lanjut Nurcahyono, untuk memastikan agar perpustakaan sekolah/madrasah diselenggarakan sesuai dengan enam Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yakni koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan.

Jika perpustakaan sekolah/madrasah yang belum sesuai dengan SNP akan mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Perpunas melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi berkoordinasi dengan Perpustakaan Daerah Provinsi terkait. Sedangkan perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah sesuai dengan SNP Sekolah/Madrasah

direkomendasikan untuk diakreditasi oleh Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.

Nurcahyono mengatakan berdasarkan hasil Sensus Nasional Perpustakaan Tahun 2018, jumlah perpustakaan sekolah/madrasah sebanyak 113.541 dan yang sudah terakreditasi per 31 Januari 2023 baru sebanyak 7.908 atau 6,96 persen. Sementara di Kaltara berdasar Dapodik 842 sekolah, telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebanyak 165 sekolah atau 19,59 persen dan yang terakreditasi sampai April 2023 sebanyak 23 perpustakaan.

"Artinya masih 93 persen perpustakaan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi sehingga masih harus dibina dan dikembangkan," ujarnya.

Karena itu, Nurcahyono berharap

dengan pelaksanaan bimtek, pengelola perpustakaan sekolah/madrasah memperoleh pengetahuan manajerial dan keahlian teknis dasar dalam mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah yang sesuai SNP.

"Saya berharap DPK Kaltara dapat meniru dan meneruskan kegiatan ini (bimtek), dengan membuat program pembinaan melalui dana APBD, sehingga Perpustakaan Sekolah/Madrasah di Kaltara sesuai SNP," ujarnya.

Sementara itu Plt Kadis DPK Kaltara Yosua Batara Payangan mengaku bahagia karena animo peserta bimtek yang cukup tinggi. Terlihat dari peserta seperti dari daerah sebuk, tulin onsoi, lumbis, sebatik, long peso, malinau, tana tidung dan sebagainya. (dkisp)





Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi.

DPRD dan Pemkot Rancang Perda Penanggulangan Limbah B3

BALIKPAPAN - DPRD dan Pemkot Balikpapan saat ini sedang merencanakan membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait kedaruratan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di lingkungan Kota Balikpapan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan, rencana pembuatan Perda ini adalah bagian dari ikhtiar untuk penanggulangan limbah B3 agar dapat teridentifikasi dengan baik.

"Perda tersebut akan memudahkan pengambilan keputusan dalam hal penanganan dan penanggulangan B3," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, rancangan untuk Perda penangu-

gulan limbah B3 ini segera dapat selesai pembahasannya dan dapat segera disahkan menjadi Perda dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Balikpapan. Disebutkan Iwan, bahwa nantinya limbah akan dikelola oleh operator yang memiliki sertifikasi dan memiliki izin pemerintah baik provinsi maupun pusat.

"Limbah tersebut kalau bisa dimusnahkan di Balikpapan ya dimusnahkan. Tetapi kalau tidak bisa dimusnahkan maka akan dikirim keluar kota untuk dimusnahkan," jelasnya.

Jika Perda ini telah dibentuk, nantinya perusahaan memiliki deteksi dini jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dan sanksi akan berlaku jika ditemukan adanya ketidaksesuaian pada

peraturan yang dirancang nanti.

"Di tahun 2012 ada kejadian yang cukup besar saat itu minyak tumpah di teluk Balikpapan hingga ada korban jiwa. Efek jeranya juga bisa berujung pidana, sehingga perusahaan yang lalai bisa berdampak hukum pidana," tambahnya.

DPRD Kota Balikpapan pun telah mengundang pihak terkait untuk memberikan masukan agar Raperda ini bisa sesuai dengan kebutuhan.

"Doakan saja semuanya bisa berjalan sesuai tahapan dan rencananya. Jadi kita segera punya Perda Pengelolaan Limbah B3," tutupnya. (adv)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Wawali Sampaikan Tanggapan Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD 2024

BONTANG – DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja dalam rangka ‘Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.’ Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (19/09/2023) siang.

Rapat kerja ini dibuka Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam dan dihadiri Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Najirah rapat serta sejumlah Kepala OPD Kota Taman.

Najirah menyampaikan jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Bontang Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dimulai dari Fraksi Golkar dan Nasdem. Salah satu jawaban yang diberikan di antaranya, terhadap saran penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang harus sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan dan visi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bontang.

“Disampaikan bahwa prioritas pembangunan yang telah dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024, telah memuat prioritas Pembangunan infrastruktur dan program-program dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dituangkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPDP Tahun 2024,” ungkapnya mengutip dari ppid.bontang-kota.go.id.

Selanjutnya jawaban terhadap pandangan umum Fraksi PKB bersama PDI Perjuangan. Salah satu jawaban yang diberikan di antaranya, terkait saran agar pemkot memaksimalkan potensi pasar (perbelanjaan), wisata, perhotelan, restoran (rumah makan), parkir dan transportasi darat dan laut serta pening-

katan produk industri lokal di tiap-tiap kelurahan.

“Dapat disampaikan bahwa pemerintah daerah terus mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan dalam mempersiapkan Bontang pasca migas,” lanjutnya.

Kemudian dilanjutkan dengan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra bersama Berkarya. Salah satunya merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai program prioritas pemerintah, untuk menanggulangi dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bontang.

“Disampaikan bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka pengangguran, dilakukan melalui program UMKM, urban farming dan job fair. Sedangkan untuk menekan angka kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan pokok, pemberian jaminan

sosial dan pengembangan budaya usaha,” terang Najirah.

Berlanjut pada jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang salah satunya terkait dengan prioritas pembangunan polder Tanjung Laut dan Pembangunan Gedung Uji KIR.

“Dapat disampaikan bahwa pada tahun 2024 pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan polder di Kelurahan Teliha dan kolam depresi di Kelurahan Kanaan dalam rangka penanggulangan banjir di Kota Bontang. Atas permintaan agar pemerintah memprioritaskan Pembangunan Gedung Uji KIR dan pemanfaatannya di Tahun 2023. Dapat disampaikan bahwa tahun 2023 akan dilakukan pemindahan peralatan uji KIR ke Gedung uji KIR Bontang Lestari, sehingga diharapkan pada Tahun 2024 pelayanan uji KIR di Bontang Lestari dapat direalisasikan.” Pungkasnya. (adv)



Wawali (kiri) menyerahkan tanggapan wali kota kepada Ketua DPRD Bontang (tengah).



ISTIMEWA

Anggota DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean.

DPRD Kukar Minta Perusahaan Smelter Nikel di Sangasanga Maksimalkan Tenaga Lokal

TENGGARONG - Smelter Nikel di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, resmi beroperasi. Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan jajaran PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) secara kompak menekan tombol tanda peresmian, Selasa (19/9/2023) kemarin.

Tentu ini menjadi investasi menjanjikan. Namun tak melulu berbicara investasi saja, harapan lainnya bisa ikut bermanfaat bagi wilayah operasi. Terutama membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi pekerja lokal.

Bahkan Bupati Kukar, Edi Damansyah, dengan mantap mengatakan, investasi senilai Rp 30 triliun ini diharapkan mampu menyedot 10 ribu tenaga pekerja lokal di Kukar. Khususnya masyarakat lokal di Kelurahan

Pendingin tentunya.

Optimisme pun disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean. Sangat mengapresiasi dan mendukung penuh, serta akan terus mengawal keinginan orang nomor satu di Kukar tersebut.

"Jangan sampai mengabaikan tenaga kerja lokal. Artinya mereka perlu menjadi prioritas, tentu sesuai dengan kemampuan mereka, kalau perlu diberikan pembekalan terlebih dahulu," ungkap Saparuddin.

Saparuddin menyebut ini menjadi tugas tambahan bagi Pemkab Kukar, bagaimana melatih dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal agar bisa berdaya di perusahaan tersebut. Sehingga proses pemberdayaan masyarakat sekitar yang menjadi dampak dari sebuah pembangunan atau kebijakan itu harus dirasakan positif masyarakat.

"Pertama itu harus menyiapkan SDM, karena ini ranahnya pemerintah dengan OPD terkait diantaranya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransaker) Kukar," lanjutnya.

DPRD Kukar pun akan memastikan pengawasan agar keinginan yang dilontarkan Pemkab Kukar bisa terlaksana. Terlebih saat ini Kukar sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal/Pengusaha Lokal. Regulasi itu mensosialisasikan kepada pihak perusahaan maupun calon tenaga kerja.

"Bisa difasilitasi menyamakan visi dan persepsi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian (baju batik hitam) saat meninjau jembatan di Rebaq Rinding.

Akses Jalan Jembatan Desa Rebaq Rinding Rusak, Sopan Sopian: Segera Dibangun

TENGGARONG- Warga Desa Rebaq Rinding, Kecamatan Muara Muntai, patut sedikit bahagia. Akses jalan desanya yang berupa jembatan kayu ulin, tepatnya di RT 07 yang belum juga tersambung, akan segera terealisasi. Yakni berupa pembangunan dari anggaran pokok pikiran (pokir) yang berasal dari anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian.

Namun, dipastikannya tidak akan maksimal. Kucuran anggaran senilai Rp200 juta, diperkirakan hanya mampu membangun jalan sepanjang 50 meter saja. Sehingga perlu dukungan dana lagi dari anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, melalui

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar. Agar menyelesaikan jalan sepanjang 250 meter lagi, dari total kebutuhan panjang jalan 300 meter.

"Itu menghubungkan ke (kantor) Kecamatan Muara Muntai," ujar Sopan Sopian, Rabu (20/9/2023).

Ia menginginkan Pemkab Kukar segera melihat kebutuhan ini. Sehingga akhir tahun ini jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat bisa terbangun dan dinikmati oleh masyarakat. Pokir yang masuk dalam perencanaan Desa Rebaq Rinding ini, dipastikannya akan terealisasi pada APBD Perubahan Kukar 2023. Diketahui, jalan jembatan ini se-

bagai akses baru pengganti jalan akses lama yang terdampak abrasi sungai. Pembangunan yang ada pun hanya baru berasal dari dana desa. Dan sangat besar penganggaran melalui skema tersebut. Sehingga mau tidak mau tetap menggunakan akses lama yang sudah terbilang rusak. Yakni berlubang dan hancur-hancur.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dari kebutuhan masyarakat melalui infrastruktur jalan jembatan," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Raff'i
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Dra Nina Dewi dalam pembukaan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi efektif bagi tenaga kesehatan dan pelatihan hukum acara perdata dan hukum acara PTUN.

Program Kaltim CorpU, BPSDM Luncurkan Portal Digital KISS

SAMARINDA - Demi mensukseskan program Kalimantan Timur Korporat University (Kaltim CorpU) ASN tangguh untuk Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim meluncurkan Portal Digital dengan nama Knowledge Integrated Solution System (KISS).

Peluncuran KISS itu diperkenalkan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi saat menyampaikan pidato pembukaan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi efektif bagi tenaga kesehatan dan pelatihan hukum acara perdata serta hukum acara PTUN pada Selasa (19/9/2023) di Aula Serbaguna Hotel Fugo Samarinda.

"Kami telah meluncurkan program Kaltim CorpU pada Jambore Inovasi Kalimantan Agustus lalu. Jadi melalui program Kaltim CorpU ini kami membuat Portal Digital KISS yang bisa diakses melalui web resmi BPSDM Kaltim," ungkap Kepala

BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP Portal Digital KISS adalah langkah awal dari program Kaltim CorpU BPSDM Kaltim dalam pengembangan SDM bagi ASN di lingkungan Kaltim.

"KISS adalah portal digital yang bisa digunakan sebagai sarana manajemen pelatihan, dan juga ada pelatihan secara mandiri didalamnya, semua model pembelajaran dan pelatihan ada di KISS. Kita bekerja sama dengan webinar lembaga non pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan SDM aparatur secara tepat, efektif dan efisien," ungkapnya.

Diluncurkannya portal digital KISS adalah untuk menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pemenuhan hak belajar 20 jam bagi ASN dan 25 Jam bagi PPPK untuk pengembangan kompetensi ASN.

"Tindak lanjut apakah pemerintah daerah tidak memenuhi atau dikenal-

kan PP 17 2020 ini, pihak perangkat daerah harus memperhatikan kebutuhan ASN-nya, makanya ayo apakah ada usulan soal pelatihan yang dibutuhkan oleh perangkat daerah bisa disampaikan ke kita" ucapnya.

Untuk mensukseskan terwujudnya ASN yang berkualitas, tentunya BPSDM tidak mampu berjalan sendiri oleh sebab itu harus ada dukungan dari perangkat-perangkat Daerah lainnya.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri, pastinya butuh dukungan perangkat daerah di lingkungan Kaltim, Oleh sebab itu melalui Kaltim CorpU ini diharapkan kita dapat melaksanakan betul-betul mengembangkan kapasitas SDM sesuai kebutuhan," pungkasnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Azza Ashila Terima Tropi Juara 1 Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Se-Kaltim

SAMARINDA - Para juara Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se - Kalimantan Timur (Kaltim) menerima tropi dan piagam penghargaan yang langsung diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani, Selasa (19/9/2023), di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Provinsi Kaltim.

Adapun Juara 1 lomba bertutur tingkat SD/MI tahun 2023 ini diraih oleh Azza Ashila dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara, Kutai Timur yang sukses menjadi juara pertama dengan membawakan cerita tentang Siluq dan Onggo yang merupakan cerita rakyat tentang legenda anak sungai Mahakam.

Usai penyerahan hadiah, Azza Ashila menceritakan perasaannya waktu di atas panggung saat prosesi penerimaan tropi. "Agak gugup waktu menerima hadiah di atas panggung," ujar gadis cantik yang didampingi gurunya ini.

Azza-sapaan akrabnya, juga berbagi kunci sukses tentang kiat-kiat hingga menjadi juara 1 pada Lomba Bertutur Kata Tingkat Kaltim 2023 ini. "Latihan terus sama dengan sabar dan sering-sering baca buku," ujar siswi kelas 5 SD YPPSB 1 Sangatta Utara ini.

Sementara itu, Guru Azza Ashila yang juga pelatih bertuturnya Tyas Azizah, bercerita saat lomba yang dijalani oleh muridnya yang sempat ada gangguan di atas panggung karena sedang flu. "Jadi sempat meler, tapi dia tangguh bisa mengatasinya hingga juri memberinya nilai tertinggi," ungkapnya.

Di sekolah, gurunya juga bercerita bahwa Azza Ashila adalah anak yang cerdas dan sering mendapat juara ke-

las. "Sistem di sekolah kita memang nggak ada sistem ranking ya, kita berdasarkan nilai, dan Ashila memang sering paling tinggi nilainya. Dia juga kan orangnya ramai," ujar Tyas.

Tyas juga mengaku bersyukur dengan kemenangan muridnya yang selama ini dilatihnya, karena sebelumnya juga pernah juara tingkat Kabupaten. "Ashila sebelum di sini juga Juara 1 Lomba Bertutur tingkat Kabupaten," tutupnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani, berharap Lomba Bertutur terus dikembangkan agar cerita-cerita rakyat bisa terus lestari.

"Bertutur inikan bercerita ya, bercerita soal cerita-cerita rakyat. Kalau bisa juga Lomba Bertutur ini pakai bahasa asli Kaltim, yakni bahasa Kutai, Dayak dan Paser, agar budaya literasi asal Kaltim tidak hilang, dan

berharap acara seperti ini terus diletakkan," tutupnya. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

Berikut daftar Juara Lomba Bertutur tingkat provinsi Kaltim :

Juara 1 : Azza Ashila dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara, Kutai Timur.

Juara 2 : Arzeli Freya Suntoro dari SDN 01 Sanga-Sanga Kukar

Juara 3 : Malika Khanaya Balqis SDN 023 Sepaku PPU.

Harapan 1 : Rafli Aulia Nasution dari SDN 008 Bontang.

Harapan 2 : Alifa Alzazhara dari MI Asy-Syifa Balikpapan.

Harapan 3 : Atika Zahra Ratifa dari SDN 016 Tanjung Redeb Berau.



Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani saat menyerahkan hadiah kepada Azza Ashila pemenang lomba bertutur tingkat SD/MI Se-Kaltim.



YUSVA ALAM

Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR Bontang, Dedy Nugraha.

Banyak Tukang Belum Peduli Sertifikasi, Dedy: Manfaatkan Pelatihan Gratis untuk Kebaikan Masa Depan!

BONTANG – Saat ini masih banyak tukang-tukang bangunan yang belum peduli pada sertifikasi, padahal ke depannya sertifikasi sangat dibutuhkan profesi tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha saat diwawancara redaksi Radar-bontang.com, Selasa (19/9/2023).

Diungkapkan Dedy, ke depannya sertifikasi hampir dibutuhkan di semua lini pekerjaan, seperti proyek-proyek konstruksi. Ke depan syarat agar bisa mengikuti tender proyek salahsatunya adanya sertifikasi, uta-

manya sertifikasi yang terstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tak hanya insinyurnya saja yang harus tersertifikasi, namun tukang-tukangnya pun juga harus.

“Kalau tidak ada sertifikasinya bisa jadi gugur tendernya,” ujarnya singkat.

Dengan sertifikasi standar BNSP akan bisa digunakan di tingkat nasional atau seluruh wilayah Indonesia, bahkan digunakan untuk proyek atau bekerja di IKN.

Dikatakannya, seharusnya para tukang dapat memanfaatkan betul apabila ada pelatihan tersertifikasi gratis. Lantaran apabila mengikuti

pelatihan mandiri biayanya cukup mahal.

“Masih ada yang tidak mengetahui fungsi sertifikasi di masa mendatang. Kata tukang tanpa sertifikat pun sekarang sudah bisa dapat pekerjaan. Seharusnya mereka bisa meninggalkan sebentar pekerjaan mereka, untuk ikut pelatihan yang waktunya paling lama 2 minggu,” bebernya.

Sekali lagi pihaknya menyarankan kepada para tukang untuk memanfaatkan momen pelatihan tersertifikasi. Hal ini untuk kebaikan profesi mereka ke depannya. (al/adv)



ISTIMEWA

Ilustrasi alat berat.

Warga Bontang Bersiap Mendaftar! Oktober Dinas PUPR Gelar Pelatihan Operator Alat Berat

BONTANG – Hingga akhir tahun nanti, Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Bontang masih akan menggelar beberapa pelatihan, salah satunya pelatihan operator alat berat. Bagi warga Bontang yang berminat bisa bersiap-siap untuk mendaftar!

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang, Usman melalui Kabid Bina Konstruksi (Bikon) Dedy Nugraha mengatakan, pelatihan operator alat berat ini rencananya akan dilaksanakan Oktober 2023 mendatang. Kapasitas kuota peserta yang bisa ditampung adalah 35 peserta.

“Alhamdulillah dana pelatihan ini dari anggaran perubahan dan sudah diketok kemarin,” ujar Dedy saat wawancara Redaksi Radarbontang.com, Selasa (19/9/2023) kemarin.

Durasi pelatihan ini akan berlangsung selama 12 hari. Untuk

pemberian teori, akan berlangsung di Kantor PU lama di Jalan DI Pandjaitan. Sementara sisa waktunya akan digunakan untuk praktek dan ujian kompetensi.

Sementara untuk syarat peserta, pihaknya mengikuti ketentuan yang sudah berlaku nasional. Khusus pelatihan operator alat berat ini masuk pada syarat peserta jenjang 2, artinya bagi peserta lulusan SMK tidak dipersyaratkan pengalaman kerja. Sedangkan untuk lulusan SMA harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun dan lulusan SD dan SMP pengalaman yang harus dimiliki minimal 2 tahun.

“Syarat ini sesuai dengan persyaratan kompetensi khusus tenaga kerja konstruksi (terampil) dari kementerian,” imbuhnya.

Dikatakan Dedy, di pelatihan ini tidak hanya diajarkan cara mengo-

perasikan alat berat, namun juga bagaimana pemeliharaan mesin-mesin alat berat. Seperti memperhatikan oliya dan lain-lain. Sehingga tidak hanya bisa menjalankan alat berat saja namun juga bisa memeliharanya.

“Jangan sampai bisa jalankan tapi kalau mesin rusak gak bisa ngapa-ngapain,” ungkapnya.

Nantinya peserta yang berhasil lulus akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari BNSP. Sertifikat ini berlaku untuk tingkat nasional bahkan untuk proyek di IKN.

Apabila ada lowongan kerja di proyek IKN, peserta sudah bisa melamar dengan mencantumkan sertifikat tersebut. “Sekarang sertifikat harus standar BNSP yang diterbitkan oleh kementerian. Sehingga berlaku nasional,” pungkasnya. (al/adv)



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Kepala DPPKB, dr Bahauddin bersama Wakil Wali Kota, Najirah dalam kegiatan manajemen kasus.

DPPKB Catat 87 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak hingga Agustus 2023

BONTANG – Kepala DPPKB Bontang, dr Bahauddin mengatakan hingga Agustus 2023, DPPKB mencatatkan ada sebanyak 87 total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terdiri dari perempuan sebanyak 36 orang dan anak-anak sebanyak 51 anak.

Ia menerangkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak masyarakat dapat melaporkan langsung ke Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bontang.

“Ada 87 kasus hingga Agustus 2023, tahun 2022 ada sebanyak 110 kasus. Sudah mendekati angka di tahun sebelumnya. Kasus meningkat karena adanya keterbukaan akses untuk melaporkan,” kata dr Bahauddin, Rabu (20/9/2023).

Cara lain yang dilakukan DPPKB yakni dengan memberikan parenting kepada orang tua dan sekolah-seko-

lah dalam pencegahannya. “Perlu dilakukan parenting di sekolah-sekolah,” katanya.

Diketahui DPPKB juga bermitra dengan Layanan Penyedia Perlindungan Perempuan dan Anak dalam membantu untuk penanganan kasus kekerasan pada anak.

Pewartu: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

Koran DIGITAL
MEDIA
KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim
 mediakaltimdotcom
 mediakaltim.com
 media kaltim



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Wawali Bontang, Najirah inginkan kekerasan perempuan dan anak tidak terjadi di Bontang.

Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Bantu Fasilitasi Masyarakat Berikan Pelayanan yang Tepat dan Terarah

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) melaksanakan pelatihan dan manajemen penanganan kasus bagi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Rabu (20/9/2023) di Auditorium Tiga Dimensi.

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah yang turut hadir membuka kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan dan manajemen kasus bagi lembaga pelayanan dan perlindungan perempuan perlu diberikan kepada pengurus maupun perempuan yang berhubungan langsung dalam penanganan kasus.

Dengan terbentuknya UPTD PPA, lanjut Najirah, pemerintah Kota Bontang melalui DPPKB terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak korban kekerasan khususnya di Kota Bontang.

"Pada pelaksanaan di lapangan, layanan penanganan kasus bukan hanya difokuskan pada UPTD PPA, namun juga dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan, layanan kesehatan ataupun lembaga-lemba-

ga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak," kata Najirah, Rabu (20/9/2023).

Selanjutnya, Najirah mengatakan perlunya adanya pelatihan dan fasilitasi kepada penyedia layanan dalam pengelolaan kasus sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang tepat, cepat dan terarah.

"Peningkatan SDM bagi penyedia pelayanan penanganan kasus kekerasan," ungkapnya.

Selain itu, pentingnya memberikan pengetahuan kepada orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak agar kasus-kasus kekerasan pada anak dapat dihindarkan. "Penting memberikan pendidikan kepada orang tua agar kasus-kasus kekerasan tidak terjadi," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), dr Bahauddin mengatakan tersedianya akses pelaporan pada kekerasan perempuan dan anak dan adanya modus baru dalam kekerasan perempuan dan anak, maka diperlukan pelatihan baik antar stakeholder terkait agar dapat melakukan kolaborasi dan cara terintegrasi dalam

penanganan kasus kekerasan.

"Dengan pelatihan ini akan dapat berkolaborasi dan terintegrasi dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak," kata Bahauddin.

Dengan begitu, Bahauddin mengatakan tujuan pelatihan yakni memberikan pemahaman tentang penelitian kasus, memahami substansi dari penanganan kasus kekerasan, mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengoptimalkan perlindungan dan meningkatkan peran tanggung jawab stakeholder terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak dengan cara komprehensif dan berkelanjutan dalam penanganan kasus.

"Peningkatan peran serta dalam perlindungan anak dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan kasus kekerasan dengan pelaksanaan kegiatan di masyarakat," pungkasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari

Di Hadapan Presiden, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28 Pada Acara Puncak Festival LIKE 2023

JAKARTA - PT PLN (Persero) menekankan komitmen dalam menjalankan transisi energi di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, para menteri dan pejabat setingkat menteri di acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Senayan pada Senin, (18/9). Komitmen yang disampaikan di acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini sejalan dengan persiapan Indonesia dalam rangka 28th Conference of The Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab November mendatang.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia. Hal ini lantas mendorong seluruh negara-negara di dunia untuk melakukan transisi energi.

"Sekali lagi, transisi menuju ke ekonomi hijau. Semua negara sekarang ini daur ulang sampah dikerjakan, produksi industri hijau dikerjakan, kendaraan listrik dimulai dibangun di negara-negara yang siap. Biodiesel digunakan, bioetanol digunakan, semua yang berbau green semua dikerjakan," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE).

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, partisipasi semua pihak menjadi kekuatan Indonesia di antara negara-negara di dunia dalam aksi iklim global dan menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim termasuk menyongsong COP28 Dubai.

"Ini merupakan upaya nyata masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan perbaikan lingkungan iklim dan aksi iklim untuk kelestarian alam," ujar Siti.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di tengah upaya perseroan melakukan transisi

ke energi bersih, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan pengembangan Accelerated Renewable Energy. Rencana ini mampu menambah porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 75 persen atau sebesar 60 Gigawatt (GW) sampai dengan tahun 2040.

Dengan Accelerated Renewable Energy Development, PLN membangun pemerataan kelistrikan nasional melalui transmisi yang menghubungkan pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan atau Green Enabling Super Grid. Infrastruktur ini menjadikan sistem kelistrikan antar pulau di Indonesia yang sebelumnya terfragmentasi menjadi terhubung satu sama lain.

"Indonesia merupakan negara dengan potensi EBT yang besar. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN mengembangkan Green Enabling Super Grid," ujar Darmawan saat Presiden mengunjungi booth PLN di Festival LIKE.

Inovasi Green Enabling Super Grid

akan dibawa oleh PLN dalam perhelatan 28th Conference of the Parties di Dubai, November ini. Lewat inovasi ini PLN bahkan siap mewujudkan mimpi besar dengan menyatukan sistem ketenagalistrikan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid.

"PLN juga mengembangkan Smart Grid dan Flexible Generation yang terintegrasi dengan Green Enabling Super Grid. Sehingga sistem kelistrikan yang dulunya rapuh dan tidak stabil, kini menjadi semakin kokoh dan andal," tegas Darmawan.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi fluktuasi supply pembangkit EBT yang bersifat intermiten, PLN juga mengembangkan Smart Power Plant, Smart Transmission, Smart Control Center, Smart Distribution dan Smart Meter.

"Inilah langkah nyata Indonesia. Menjadi pemimpin transisi energi dunia. Bukan hanya mengakselerasi energi terbarukan, namun juga memperkuat kapasitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Net Zero Emissions 2060," pungkas Darmawan. (adv)





ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

dr Anwar, SpKK, dokter spesialis kulit dan kelamin saat memberikan penyuluhan di RSUD.

Pekan Kepedulian Penyakit Jamur, RSUD Taman Husada Berikan Penyuluhan kepada Masyarakat

BONTANG – Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang memberikan penyuluhan awam mengenai infeksi jamur pada kulit kepada masyarakat yang sedang berobat atau berkunjung ke RSUD Taman Husada Kota Bontang.

Penyuluhan awam ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan pada Rabu (20/9/2023) bertempat di Lobby RSUD.

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr Anwar, SpKK, menjelaskan kegiatan penyuluhan dilaksanakan bersama tim promosi kesehatan RSUD kepada masyarakat atau pasien yang berobat ke RSUD. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka minggu kepedulian terhadap penyakit jamur

yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Seluruh Indonesia (Perdoski).

“Kegiatan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Taman Husada Bontang,” kata dr Anwar saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2023).

Selanjutnya, dr Anwar mengatakan sasaran dari penyuluhan mengenai penyakit jamur yakni masyarakat yang sedang datang berobat di rumah sakit dan memberikan materi mengenai infeksi jamur pada kulit.

“Audiensnya pasien yang sedang menunggu di lobi RS. Materinya mengenai infeksi jamur seperti kadas, kupas dan panu dan faktor penyebabnya hingga pengobatannya,” jelasnya.

Dr Anwar menambahkan tujuan

dilakukannya penyuluhan agar masyarakat agar paham dan mengetahui mengenai penyakit infeksi jamur serta menyelenggarakan pekan kepedulian terhadap penyakit jamur.

“Harapannya dengan pemberian pengetahuan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana gejala ketika terkena infeksi jamur pada kulit dan menghindari faktor risiko dan memberikan informasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat,” pungkasnya.

Pemberian materi langsung diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan alat bantu flyer atau pamflet pencegahan penyakit kulit. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Wigen Kamas No. 116A, Sekeloa Baru, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Legislator Minta Rekrutmen Karyawan Dilakukan Satu Pintu

TANJUNG REDEB - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Berau, Madri Pani menginginkan proses perekrutan karyawan perusahaan di Kabupaten Berau harus satu pintu, yakni melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Hal ini bertujuan agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat optimal.

Dirinya juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi putra daerah, khususnya yang baru lulus kuliah. Sebagai upaya menurunkan angka pengangguran sehingga angka kemiskinan juga bisa ditekan.

Itu disampaikan setelah menghadiri Wisuda Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) ke III di Ball Room SM Tower eks Hotel Makmur. Di mana sebanyak 312 wisudawan dan wisudawati berhasil mendapat gelar sarjana strata satu (S1) dari UMB. Mereka berasal dari tiga program studi yakni, manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan.

Dikatakan Madri, menurunkan angka pengangguran itu menjadi tanggungjawab bersama baik legislatif selaku pendorong dan penyerap

aspirasi masyarakat. Serta eksekutif sebagai pengambil kebijakan. Untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, supaya orangtua tidak merasa sia-sia telah menyekolahkan anak-anaknya.

Dirinya mencontohkan, pekerja dari luar jika ingin bekerja ke Kabupaten Berau harus melalui satu pintu yakni Disnakertrans Berau. Supaya ke depan ada keadilan bagi putra daerah yang ingin mencari pekerjaan di daerah sendiri.

"Jadi anak-anak lokal ini tidak iri, jika ada sub kontraktor suatu perusahaan yang mendatangkan pekerja dari luar," ucapnya.

Jika perekrutan melalui Disnaker tentunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) bisa menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya juga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau. Baik dari kesehatan, pendidikan atau yang lainnya.

"Kalau bisa diwujudkan satu pintu, kiranya terukur otomatis 3 faktor yang bisa kita tekan. Yakni, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. Serta otomatis kese-

jahteraan masyarakat meningkat sehingga berdampak pada stunting yang bisa kita tangani," terangnya.

Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 8 tahun 2018 perihal Perlindungan Tenaga Kerja Lokal perlu diperkuat dengan dibuatkan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup). Sebagai implementasi penerapan Perda tersebut.

"Ada semacam edukasi dan inovasi memberikan suatu kebijakan. Jangan sampai lapangan pekerjaan di Berau yang tinggi tapi justru tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan orang yang baru datang dari luar," paparnya.

Madri cukup prihatin dengan masyarakat lokal yang memiliki KTP dan KK asli Berau tapi justru tidak diprioritaskan. Baik dari pihak ketiga dan sub kontraktornya hingga dunia perhotelan. Makanya perlu ditekan dari sekarang.

"Kasihlah penduduk yang tinggal di Berau seharusnya lebih diprioritaskan oleh semua pihak yang membutuhkan tenaga kerja," tutupnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendie Lie Jaya.

DPRD Minta Penanganan Abrasi Derawan Tanpa Ganggu Habitat Penyu

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendie Lie Jaya menyebut, penanganan abrasi di Pulau Derawan perlu dilakukan kajian mendalam, khususnya soal pemecah gelombang. Jangan sampai merusak habitat penyu yang ada di sana.

Penanganan abrasi di Pulau Derawan menurutnya harus jelas konteksnya ditujukan untuk apa. Jika untuk menyelamatkan pulau dan menjaga aset daerah. Tentunya sangat penting dilakukan sesegera mungkin.

"Kalau soal penyu, habitat aslinya kan di laut dan di darat hanya untuk bertelur saja. Pulau Derawan hanya salah satu pulau yang disinggahi penyu untuk bertelur, masih banyak pilihan pulau lainnya," jelasnya, Rabu (20/9/2023).

Sehingga, penanganan abrasi memang harus diutamakan. Apalagi jumlah penduduk di Pulau Der-

awan cukup padat. Potensi wisata di sana juga menjadi destinasi unggulan pariwisata domestik. Dengan menyelamatkan Pulau Derawan artinya juga menyelamatkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sana.

"Memang penanganan abrasi ini urgent untuk diusahakan agar abrasi tidak parah," tegasnya.

Terkait pemecah gelombang, kata dia, sangat erat hubungannya dengan penanganan abrasi. Diharapkan, jika memang harus dipasang pemecah gelombang, instansi terkait dapat mengkajinya secara mendalam. Terlebih pemilihan jenis pemecah gelombang yang cocok. Serta, dengan tidak mengganggu jalur bertelurnya penyu di Pulau Derawan.

"Nanti bisa dikaji lagi, misal posisinya di jalur yang tidak dilewati penyu agar tetap bisa lewat," tuturnya.

Wendie menambahkan, habitat penyu selama ini hanya sebagian kecil saja yang ada di Pulau Derawan. Angka harapan hidupnya pun masih lebih tinggi di pulau lainnya. Untuk berkembang biak masih bisa memanfaatkan pulau sekitar Derawan. Seperti Pulau Sangalaki. Yang memang khusus untuk konservasi penyu, bahkan sudah menjadi spot pariwisata meskipun terbatas.

"Memang kita lihat di Derawan jumlah penyu bertelur kecil sekali, dibanding pulau lain. Misalnya Pulau Sangalaki," ucapnya.

"Harapannya saat ini penanganan abrasi di Pulau Derawan bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan habitat penyu yang ada di sana," tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Nicha Ratnasari



Kepala Dinas PU Kota Balikpapan, Rita saat mengklarifikasi soal anggaran Rp 80 miliar untuk DAS Ampal.

Soal Anggaran DAS Ampal Rp 80 Miliar, Ini Penjelasan Kepala DPU Balikpapan

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan yang menyoroti adanya anggaran tambahan sebesar Rp 80 miliar untuk proyek penanganan banjir daerah aliran sungai (DAS) Ampal, ditanggapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita.

Rita yang mengklarifikasi adanya tambahan anggaran untuk DAS Ampal tersebut mengaku jika hal tersebut adalah keliru. Ia pun memastikan tidak ada penambahan anggaran Rp 80 miliar untuk proyek pengendalian banjir tersebut.

"Saya menginformasikan, tidak ada penambahan anggaran dalam pengerjaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Rita menjelaskan, anggaran yang dimaksud tersebut merupakan hasil penjumlahan dari yang tidak bisa diserap dari APBD Perubahan tahun 2021.

Adapun rincian skema pembiayaan

DAS Ampal bersumber dari APBD tahun 2021 senilai Rp 20 miliar, APBD tahun 2022 senilai Rp 20 miliar, APBD Perubahan tahun 2022 senilai Rp 25 miliar, APBD tahun 2023 senilai Rp 50 miliar dan APBD Perubahan tahun 2023 senilai Rp 35 miliar.

"Jadi dari data yang ada, maka di akhir APBD Perubahan tahun 2023 ini senilai Rp 80 miliar, karena berdasarkan hasil penjumlahan dari yang tidak bisa diserap dari APBD Perubahan tahun 2021," jelasnya.

Rita menegaskan dalam proses pembiayaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal, setiap tahunnya sudah disepakati antara Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan.

"Saya pastikan tidak ada penambahan apapun dalam paket pekerjaan proyek pengendalian banjir DAS Ampal ini. Nilainya tetap dari pagu awal yakni sebesar Rp 150 miliar," tegasnya.

"Saya punya hak untuk mengklar-

ifikasi ini supaya tidak membias di masyarakat, karena di situ informasinya ada dana tambahan," tambah Rita.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, bahwa anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan untuk membiayai skema pembiayaan proyek DAS Ampal. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan tahun 2023, yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Menurut Budiono, anggaran tersebut berasal dari Pemerintah Pusat, yang tentunya diberikan berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Anggaran tersebut, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan multiyears untuk proyek DAS Ampal.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Rapat persiapan KukarLand Festival 2023 yang dipimpin Asisten II Setkab Kukar, Wiyono.

KukarLand Festival 2023 Siap Digelar, Gapai Rekor dan Berkah untuk Ekraf

TENGGARONG - KukarLand Festival 2023 siap menghentak Kalimantan Timur (Kaltim). Tujuh artis ibu kota, siap manjakan semua jenis genre pecinta musik. Mulai dari musik jenis jazz, pop, dangdut, reggae, rock, metal, hingga indie pop. Dipastikan segala kalangan dan usia bakal memadati Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, sebagai venue yang sudah ditunjuk.

Kesiapan ini terlontar dari mulut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Slamet Hadiraharjo. Setelah mengikuti rapat gabungan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, yang dipimpin langsung Asisten II Setkab Kukar, Wiyono.

"Sesuai dengan hasil rapat KukarLand hari ini sudah mengerucut artinya tidak ada kendala di lapangan," ujar Slamet.

Hal-hal teknis saja yang diklaim Slamet, masih perlu persiapan matang. Seperti kebersihan, keamanan dan parkir. Ini sangat penting. Faktor penunjang keberhasilan event pamungkas Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F).

Jelang perhelatan pada 22-23 September 2023 ini, total ada 3 agenda lagi yang sedang dikerjakan Dispar

Kukar. Pertama, akan ada kolaborasi bagaimana penanganan kebersihan sampah yang ditinggalkan oleh penonton yang datang. Kedua, simulasi atau gladi di lokasi acara, memastikan acara sesuai dengan acara. Terakhir, mengundang OPD-OPD agar bisa ikut terlibat dalam percetakan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Diketahui, KukarLand Festival 2023 akan membuat rekor menggunakan Pesapu terbanyak dalam satu event. Sekedar informasi, Pesapu merupakan ikat kepala bercorak batik khas Kutai.

Kukar pun pernah dapat rekor dari MURI dalam hal event musik. Yakni gelaran musik rock gratis terbesar di Indonesia dalam rangkaian Kukar Rockin' Fest (2014). Juga ada pemecahan rekor menerbangkan lampion sebanyak 5.500 buah pada Festival Kota Raja ke-2 (2013).

Untuk kebersihan, akan melibatkan seluruh OPD di Kukar, tanpa terkecuali dengan mendelegasikan beberapa staff. Untuk masalah parkir, Dishub Kukar yang akan jadi leading sector-nya. Nantinya bakal membagi masing-masing zonasi, agar alur lalu lintas dan mobilitas di venue dapat

diatur.

Keberadaan toilet umum pun jadi faktor penting suksesnya gelaran KukarLand Festival 2023. Sudah menjalin komunikasi dan koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar. Mereka memiliki toilet portabel yang akan ditempatkan di beberapa lokasi.

Yang paling penting masalah sampah, selain meminta delegasi masing-masing OPD. Slamet pun memastikan Disperkim dan DLHK Kukar akan menyiapkan kantong sampah. Sembari memberikan edukasi kepada penonton yang datang, "tidak buang sampah sembarangan".

Tidak hanya memberikan berkah bagi pelaku UMKM, hotel-hotel juga kecipratan rezeki. Dari informasi yang didapat dari seluruh GM hotel di Tenggarong dan sekitarnya. Tanggal 22-23 September, seluruh kamar terisi penuh. Wajar saja, memang KukarLand Festival 2023 menargetkan penonton sebanyak 20-50 ribu yang datang menyaksikan. "Artinya apa yang kita harapkan itu sudah tercapai," tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Pengawasan Implementasi P3DN Harus Mampu Penuhi Produk Lokal

SANGATTA - Sosialisasi pengawasan implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan launching “Si Enggang Kutim” Tahun 2023 dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (20/9/2023).

Kegiatan ini turut dirangkai dengan penandatanganan komitmen oleh perangkat daerah (PD) dan menghadirkan pemateri dari Biro Pengadaan Barang (BPJ) Setda Kaltim Anik Nurul Aini.

Dalam arahnya, Bupati Ardiansyah Sulaiman meminta UMKM maupun home industry dapat meningkatkan produk lokalnya dan memasukkan di e-katalog.

“Kutim harus mampu memenuhi

produk lokal dalam negeri sesuai dengan P3DN. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM, sudah ada 20 UMKM yang masuk di e-katalog. Kita berharap laporan berikutnya, Kutim tidak ada persoalan karena hanya sistemnya tidak berjalan,” tegasnya.

Selanjutnya, untuk semua instansi yang terkait dengan P3DN untuk bisa dilaksanakan karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) apalagi diawasi oleh KPK RI. “Nah, khusus “Si Enggang Kutim” juga harus dapat meningkatkan terbangnya P3DN di Kutim,” urainya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim Muhammad Hamdan melaporkan bahwa kegiatan ini penting dan diharuskan karena menurut data, Kutim terma-

suk yang rendah se-Kaltim.

“P3DN sudah ada 1 tahun yang lalu, namun kepatuhan untuk penginputan data belum. Ini langkah kami mengerakkan Tim P3DN di Kutim. Masing-masing PD membentuk P3DN di internal,” jelasnya.

“Kami juga membuka komitmen kepada kepala PD. Komitmen ini kita harapkan sepakat mengikuti P3DN,” bebernya.

Ia juga mengatakan launching “Si Enggang Kutim” sebagai langkah konkrit Kabupaten Kutim dalam menetapkan peraturan dengan implementasi P3DN.

*Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari*



Razia pajak kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Grogot.

Realisasi Pajak Kendaraan di Paser Masih 65 Persen

PASER - Realisasi penerimaan pajak kendaraan tengah disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Paser. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut memberikan target.

Pada 2023 ini ditargetkan oleh Bapenda Provinsi Kaltim senilai Rp 80 miliar untuk penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Paser. Hingga medio September masih di angka sekira Rp 52 miliar. "Sampai saat ini masih 65 persen capaian dari target kami," kata Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPRD Kabupaten Paser, Margo Birawan, Rabu (20/9/2023).

Dijelaskan Margo, terdapat beberapa jenis penerimaan pajak. Di antara-

nya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau dendanya dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Guna capaian realisasi lampau target, saat ini intens melakukan operasi taat pajak kendaraan.

Berdasarkan catatan pihaknya, hingga September 2023, sekira 300 kendaraan roda dua dan empat yang terjaring dalam razia pajak kendaraan. Dirinya menyebut langkah tersebut cukup efektif.

Pasalnya, dapat langsung menyelesaikan pembayaran pajak di tempat, karena telah disediakan Samsat Mobile yang standby di lokasi razia. "Kalau tak membawa uang kami buat surat pernyataan dan STNK kita bawa dulu," terangnya.

Selain itu akan melakukan jemput bola, khususnya kendaraan dalam

lingkup perusahaan. Ia menyebut telah menyampaikan dan meminta pihak perusahaan untuk mendata kendaraan atau intentaris kantor. "Sudah kami surati perusahaan-perusahaan. Sampai saat ini masih menunggu datanya ada berapa. Semoga Oktober sudah bisa jalan jemput bola," pungkask dia.

Adapun mekanisme lain dalam jemput bola tak menutup kemungkinan dilakukan. Namun sejauh ini masih dalam pembahasan internal UPTD PPRD Kabupaten Paser, termasuk pihak-pihak yang dilibatkan nantinya.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



Proses pengangkutan kelapa sawit.

Replanting di Paser Kembali Dilangsungkan

PASER - Ratusan hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Kabupaten Paser bakal dilakukan peremajaan atau replanting oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peremajaan sawit akan dilakukan di lahan 254 hektare. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser, Djoko Bawono mengatakan, replanting akan dilakukan setelah penandatanganan kerjasama oleh 3 pihak.

"Penandatanganan itu rencananya akan dilaksanakan di Jakarta antara lembaga pekebun, perbankan, dan BPDPKS," terang Djoko, Kamis (20/9/2023).

Nantinya, terdapat 16 lembaga petani dari seluruh Indonesia yang akan melakukan penandatanganan kerjasama, termasuk dari Kabupaten Paser. "BPDPKS sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi 254 hektare lahan sawit akan diremajakan," tambahnya.

Ratusan hektare lahan itu merupakan lahan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari 100 pekebun. Bantuan peremajaan sawit dari BPDPKS kepada para pekebun di Paser ini, dinilai sangat membantu ekonomi masyarakat.

"Karena sektor perkebunan, menyumbang 8 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Paser, yang salah satu indikator penting

untuk mengetahui kondisi ekonomi daerah," ulas Djoko.

Sementara untuk industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menyumbang 5 persen PDRB, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang 11 persen PDRB. Berdasarkan data, total kebun sawit yang sudah diremajakan mencapai 7.689 hektar di tahun 2022.

"Kami terus memfasilitasi para pekebun untuk melengkapi persyaratan agar bisa mendapatkan kucuran dana dari BPDPKS, hitungan kami masih ada sembilan lembaga pekebun yang belum mendapat rekomtek replanting dari BPDPKS," ujarnya. (bs)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun saat menyampaikan sambutan pada ramah-tamah di Aula Islamic Center PPU, Rabu (20/9/2023).

Tiba di PPU, Makmur : Terima Kasih Telah Diterima

PPU - Makmur Marbun akhirnya tiba juga di PPU, Rabu (20/9/2023). Mengenakan baju putih, yang sudah terhiasi bordiran 'M Marbun' di sebelah kanan, dan 'Pj Bupati' di sebelah kirinya.

Agenda pertamanya ialah menghadiri pisah-sambut Bupati PPU periode 2018-2013. Acara ramah-tamah pengantar akhir masa bhakti Hamdam Pongrewa itu digelar di Aula Lantai I Masjid Al- Ikhlas Komplek Islamic Center.

Dalam kesempatan wawancara dengan awak media, Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat PPU. Termasuk ke jajaran pegawai di lingkungan Pemkab PPU.

Disampaikan seiring telah diterimanya dirinya beserta keluarga, di tempat tugas yang baru sebagai kepala daerah sementara Benuo Taka.

"Saya akan selalu berinteraksi dengan bapak, ibu, siapapun itu. Terma-

suk kepada ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya yang ada di PPU. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih telah menerima saya beserta keluarga di Kabupaten PPU ini," ucapnya.

Menurutnya, hal itu sebagai kontribusi yang bisa dilakukan sebuah pimpinan terhadap seluruh masyarakatnya. Sementara dirinya, sambung Makmur, harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya datang ke sini karena ditugaskan Pak Presiden dan Pak Mendagri. Saya ini anak buah atau bawahannya Mendagri. Saya ditugaskan beliau di sini, bekerja dan memberikan laporan pertiga bulan sekali ke pada Mendagri yang menugaskan saya. Jadi amanah ini yang harus dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Secara khusus, Makmur juga menyampaikan ucapan terima kasih beserta apresiasinya pada Hamdam. Yang dianggap telah berkontribusi

terhadap kemajuan di PPU selama menjabat.

"Karena beliau sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat PPU. Saya harus mengucapkan terima kasih ke pada beliau, karena saya penerusnya. Apapun pekerjaan rumah yang belum selesai, saya siap melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut," katanya.

Di kesempatan yang sama, Bupati PPU sebelumnya, Hamdam didampingi istrinya, Satriyana Sirajuddin menyambut kedatangan pemimpin daerah baru penerusnya. Peralihan kekuasaan secara damai adalah suatu konsep penting bagi pemerintahan.

"Saya akhiri masa jabatan ini dengan tersenyum. Dan kita berharap siapapun yang menjadi pemimpin daerah ini agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya," tutup Hamdam.

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha Ratnasari

Nihil Tanggapan Masyarakat, KPU PPU Proses 355 Bacaleg ke Penetapan DCT

PPU - Sebanyak 355 bakal calon legislatif (bacaleg) Penajam Paser Utara (PPU) tengah berproses untuk masuk dalam daftar calon tetap (DCT). Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU saat ini masih melakukan verifikasi dan pencermatan.

Semenjak diumumkan, 19 sampai 23 Agustus lalu, diketahui KPU PPU sama sekali tidak mendapatkan tanggapan apalagi laporan dari masyarakat. Waktu yang diberikan ialah sejak 19 sampai 28 Agustus.

"KPU sudah mengumumkan DCS, di media cetak, media sosial, website dan lain-lain, disertai dengan permohonan masukan dan tanggapan masyarakat. Namun sampai hari terakhir masa, masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada satu pun yang masuk," ujar Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU PPU, Tono



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Tono Sutrisno.

Sutrisno, Rabu (20/9/2023).

Oleh karena itu, jumlah bacaleg dari hasil pleno DCS tidak berubah. Pun terkait pemenuhan syarat administrasi bakal calon, seperti ijazah, surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya yang tidak dipersyaratkan, dan lainnya dapat dinyatakan tidak ada masalah.

"Ada 7 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, yang tidak ada tanggapan

masyarakat, termasuk PPU. Jadi proses dilanjutkan ke persiapan penetapan DCT," sebutnya.

Meski begitu, Tono berharap pada proses selanjutnya tidak akan ada masalah lagi dan bisa berjalan sesuai dengan tahapan. Sesuai jadwal, penetapan DCT dimulai dari pencermatan pada 24 September - 3 Oktober 2023.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan dan penetapan DCT mulai 4 Oktober 2023 sampai pengumuman DCT pada 4 November 2023. "Tentu jika ada masalah di kemudian hari, maka akan dilakukan mekanisme sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tapi, semoga tidak ada masalah ataupun kendala," pungkas Tono.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



**Kode Promo
BTSOLI**

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi



AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

Bontang



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud

Hasanuddin Mas'ud Optimis Pj Gubernur Merupakan Salah Satu Dari Usulan DPRD Kaltim

SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yakin bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kelak merupakan salah satu nama usulan dari "Karang Paci". Meskipun bila menengok pengangkatan Pj Bupati Penajam Utara (PPU), bukan salah satu nama usulan DPRD PPU.

DPRD Kaltim telah mengirim lima nama rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini. Mekanisme penetapan lima nama usulan DPRD Kaltim sendiri berdasar hasil usulan dari tiap fraksi DPRD Kaltim.

Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Lima nama yang diusulkan DPRD Kaltim yakni, Deputi Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN, Alimudin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, dan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni serta Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur.

"Sudah kirimkan 5 nama dan 3 diantaranya kita rengking tertinggi. Kita tetap optimis nama yang terpilih untuk Pj Gubernur Kaltim salah satu yang kita kirimkan sebagai usulan," ucap Politisi Golkar tersebut, Rabu (20/9/2023).

Sebagai informasi Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal

Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Makmur Marbun, diaduk mengemban tugas sebagai Pj Bupati PPU.

Nama Makmur Marbun tidak tercatat sebagai usulan DPRD PPU kepada Pemprov Kaltim. Usulan DPRD PPU yakni Agus Hari Kesuma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

Sedangkan dua kandidat lainnya adalah Suhardi, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD PPU, dan Adriani Amsyar, yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik di Sekretariat Pemda PPU.(eky)



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU) :**

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com

www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbalikpapan.com



**PUSKESMAS BAIKNYA
SIAPKAN RUANGAN KHUSUS
LAYANAN LANJUT USIA**

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Suasana pelatihan dengan tema kejiwaan pasien usia lanjut.

Nakes & Dokter Wajib Pahami Kondisi Pasien Lansia

SAMARINDA - Kondisi kejiwaan pasien lanjut usia (lansia) wajib menjadi perhatian khusus. Salah satunya, depresi dan demensia adalah hal yang paling sering ditemui.

Item itu menjadi salah satu topik bahasan dalam Pelatihan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kaltim 2023 Angkatan II dan III.

"Pelayanan kesehatan jiwa dan intelegensia pada usia lanjut lebih kepada pelayanan dengan pendekatan yang lebih intensif dengan pertanyaan dengan konsep diskusi yang lebih menenangkan pasien," dr. Eka Yuni Nugrahayu, Sp.KJ dari Rumah Sakit Atma Husada.

Diuraikan, pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kondisi kehidupannya, kondisi semangat, tingkat kebahagiaan, permasalahan dan bagaimana kemampuan pasien saat ini, dilakukan dengan

teknis yang tepat agar bisa menumbuhkan rasa nyaman pasien.

Menurutnya, kondisi depresi adalah hal paling sering ditemui. Untuk pasien depresi, cara dokter atau nakes berkomunikasi harus bisa memancing, pasien untuk lebih semangat.

"Bagaimana pembawaan dokter dan nakes sangat memengaruhi kondisi pasien saat ditanya terkait kondisinya," katanya. Apalagi kondisi pasien depresi sangat rentan dan sangat sensitif. Proses mengorek informasi juga harus lebih detailing. Untuk bisa mendapatkan kondisi ideal dalam proses itu, ada sesi latihan bagi seluruh peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok.

"Tujuannya untuk mendapatkan kondisi ideal saat proses memahami kondisi pasien," Ucapnya lagi. (Rsi/adv/dinkes)

Pewarta : Adhi Abdhian
Editor : Nicha Ratnasari

 **PEMERINTAH PROVINSI**
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



 **GERMAS**
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. H. Ir. Isran Noor, M.Si
GUBERNUR KALTIM

H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si
WAKIL GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
GUBERNUR KALTIM



Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati. (adhi/mediakaltim)

LAYANAN LANJUT USIA BUTUH RUANGAN KHUSUS DI PUSKESMAS

SAMARINDA – Hal menarik terkait bagaimana pelayanan kesehatan pada usia lanjut disampaikan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati pada Pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan II dan III Tahun 2023 di meeting room Horison Hotel lantai III, Senin (18/9/2023).

Tak bisa dimungkiri, para lanjut usia masih banyak terikat pada kegiatan-kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan kemampuan, minat dan kondisi kesehatannya.

Untuk mengimbangnya, pelayanan lanjut usia di Puskesmas diupayakan secara lintas disiplin dan lintas sektor. Artinya, pelayanan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan gender dan kesamaan hak.

Hal ini sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 TAhun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas bahwa sasaran pada kebijakan tersebut adalah pra lanjut usia (45-59 tahun), lanjut usia (60 tahun), lanjut usia risiko tinggi (lanjut usia 70 tahun atau Lanjut Usia dengan masalah kesehatan), keluarga, masyarakat tempat Lanjut Usia berada serta sasaran tidak langsung yaitu masyarakat luas, organisasi sosial, petugas kesehatan, maupun Ibu Hamil, Bayi dan Balita, Usia Sekolah, Remaja dan Usia Subur.

“Untuk itu, pelayanan kepada lanjut usia yang datang ke Puskesmas, sebaiknya diberikan ruangan khusus supaya tidak harus mengantre bersama dengan pasien umum lainnya,” katanya. Tapi, apabila kondisi Puskesmas tidak memungkinkan, dapat

dilakukan diruangan pemeriksaan umum dengan syarat pasien lanjut usia harus didahulukan.

“Prinsip layanan pasien lanjut usia di Puskesmas adalah berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri,” sebutnya. Lanjut usia yang sehat adalah lanjut usia berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri masuk dalam kategori kelompok 1 dan 2 yaitu lanjut usia yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau tergantung pada orang lain tapi sangat sedikit, atau mempunyai penyakit yang terkontrol dengan kondisi medik yang baik.

“Ingat, tidak semua pasien geriatri harus dirujuk ke RS, ada kasus-kasus pasien geriatri sebenarnya masih bisa ditangani di Puskesmas,” pesannya. (rs1/adv/dinkes).

Pewartu : Adhi Abdian
Editor : Nicha Ratnasari



Foto bersama peserta pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri Tenaga Kesehatan Tingkat Kaltim. (adhi/mediakaltim)

DINKES KALTIM GELAR PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN GERIATRI UNTUK NAKES

SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim menggelar Pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan II dan III Tahun 2023 di meeting room Horison Hotel lantai III pada Selasa (19/9/2023).

Pelatihan yang menghadirkan perwakilan Puskesmas se-Kaltim ini, diisi oleh pemateri dari tim fasilitator Pelayanan Kesehatan Geriatri seperti, dr. Santy Sijabat, Sp.PD, dr. Muhibuddin Perwira Negara dan dr. Sp.KJ (RS AHM). Kemudian ada dari PDGKI Cabang Kaltim, PDGI Wilayah Kaltim dan perwakilan PPNI Provinsi Kaltim

Hadir juga dalam sesi pembukaan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Kaltim, dan Master of Training (MoT) dari UPTD Bapelkes Provinsi Kaltim

Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Dinkes Kaltim da-

lam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan Lanjut Usia untuk mencapai Lanjut Usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

“Lanjut Usia adalah masalah kesehatan sehingga diperlukan pembinaan kesehatan pada kelompok Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ., M. Kes., MARS melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati.

“Melalui kegiatan pelatihan ini baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang merupakan unit terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan diharapkan mampu melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tingkat dasar bagi lanjut usia, paparnya.

Lebih detail, ia mengurai tujuan pelaksanaan pelatihan agar

meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan santun lanjut usia, meningkatnya koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya. Selain itu, lanjut dia, meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia, dan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat

“Prinsip pelayanan kesehatan Lanjut Usia yaitu menjadi Lanjut Usia sehat adalah hak asasi setiap manusia. Artinya, pelayanan kesehatan primer adalah ujung tombak untuk tercapainya Lanjut Usia sehat yang didukung oleh pelayanan rujukan yang berkualitas atas partisipasi Lanjut Usia,” pungkasnya. (rs/adv/dinkes)

Pewarta : Adhi Abdian
Editor : Nicha Ratnasari